

FUNGSI KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENGEMBANGKAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Perangkat Desa Dermaji Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi

Oleh:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Anas Amrulloh

NIM: 15730118

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Amrulloh

NIM : 15730118

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : *Advertising*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 11 Desember 2019

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Anas Amrulloh

NIM: 15730118



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 0812272 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281

NOTA DINAS PEMBIMBING

FM-UINSK-PBM-05-02/RO

Hal : Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta .

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Anas Amrulloh
NIM : 15730118
Prodi : ILMU KOMUNIKASI
Judul :

**FUNGSI KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENGEMBANGKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**
**(Studi Deskriptif Pada Perangkat Desa Dermaji Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah)**

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudara segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Desember 2019
Pembimbing

Dr. Yani Tri Wijayanti M. Si
NIP. 19800326 200801 2 010



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-50/Un.02/DSH/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : FUNGSI KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENGEMBANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Perangkat Desa Dermaji Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANAS AMRULOH
Nomor Induk Mahasiswa : 15730118
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Yani Tri Wijayanti, S.Sos, M.Si
NIP. 19800326 200801 2 010

Penguji I

Penguji II


Dra. Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si.
NIP. 19610816 199203 2 003

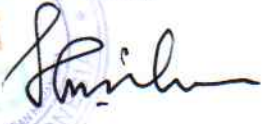

Drs. Bono Setyo, M.Si.
NIP. 19690317 200801 1 013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Dekan




Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

MOTTO



AKU TIDAK INGIN LEBIH BAIK DARI ORANG LAIN, TAPI AKU INGIN
LEBIH BAIK DARI KEMARIN

-Peneliti



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, peneliti persembahkan untuk :

KEDUA ORANG TUAKU, BAPAK HARTONO DAN IBU FATIHAH SERTA

KELUARGAKU

ALMAMATER

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Fungsi Komunikasi Organisasi dalam Mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Perangkat Desa Dermaji, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah) dengan lancar.

Peneliti sangat menyadari skripsi ini tidak akan selesai dan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. Mochammad Sodik, S.Sos, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Siantari Rihartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Yani Tri Wijayanti, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi peneliti yang selalu sabar memberikan saran, kritik, serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Bono Setyo, M.Si, selaku penguji dua dalam munaqosyah, dan Ibu Dra. Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si, selaku penguji satu dalam seminar proposal dan munaqosyah. terimakasih atas saran dan arahan serta ilmu yang telah diberikan.

5. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Hartono dan Ibu Fatimah yang selama ini telah banyak berkorban, membesarkanku dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan dukungan dan energi yang besar lewat doa-doanya, memberikan dukungann materil dan moril disetiap langkah peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah S1.
6. Kakakku Ali Sugeng Riyadi yang selama ini telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji yang telah memberikan izin penelitian, dan Bapak Harry Haryono selaku Sekretaris Desa Dermaji, serta seluruh perangkat Desa Dermaji yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
8. Sahabat Zuhri Amin Aulawi dan Alfiandana Susilo Aji, Sahabat Barokah, Husni, Fauzan, Wafa, Mahfud, Fuad, Kuni, Meldi, Afri dan teman-teman takmir masjid Al-Barokah, yang selama ini telah menjadi sahabat terbaik.
9. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Himmah Suci) dan Himacita, yang selama ini telah menjadi tempat belajar berorganisasi dan berdiskusi peneliti. Terimakasih atas ilmu, pengalaman dan relasi yang telah diberikan.

Yogyakarta, 09 Desember 2019
Penyusun,

Anas Amrulloh
15730118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Landasan Teori.....	13
G. Kerangka Pemikiran.....	26
H. Metodologi Penelitian	27
BAB II GAMBARAN UMUM.....	36
A. Gambaran Umum Desa Dermaji.....	36

1. Sejarah Desa Dermaji.....	36
2. Letak dan Luas Wilayah.....	39
3. Demografi Penduduk Desa Dermaji	41
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dermaji.....	44
5. Lembaga Pemerintahan Desa Dermaji.....	44
B. Gambaran Umum Kebijakan Publik Desa Dermaji.....	46
1. Program Pemerintah Desa Dermaji.....	46
2. Layanan Informasi Publik Desa Dermaji.....	48
C. Gambaran Umum Keterbukaan Informasi Publik Desa Dermaji	52
1. Website Desa Dermaji.....	52
2. Musyawarah Desa Dermaji.....	53
3. Papan Informasi Desa	54
BAB III PEMBAHASAN.....	55
A. Fungsi Informatif dalam Mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Dermaji	58
B. Fungsi Regulatif dalam Mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Dermaji.....	78
C. Fungsi Persuasif dalam Mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Dermaji	83
D. Fungsi Integratif dalam Mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Dermaji	88
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100

B. Saran dan Rekomendasi	102
C. Kata Penutup	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar Statistk Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ...	5
Gambar 2.1 Peta Rupa Bumi Daerah Desa Dermaji	41
Gambar 2.2 Statistik Pendidikan Desa Dermaji.....	42
Gambar 2.3 Statistik Pekerjaan Penduduk Desa Dermaji	43
Gambar 2.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dermaji	44
Gambar 3.1 Informasi Kabar Desa Dermaji	68
Gambar 3.2 Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Dermaji.....	91
Gambar 3.3 Website Desa Dermaji.....	96
Gambar 3.4 APBDes dan Master Plan 2025 Desa Dermaji.....	99



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matrik Tinjauan Pustaka	12
---	----



ABSTRACT

The transparency of Public Information is an important and fundamental aspect to guarantee human rights in Indonesia, especially in the communication and information area. As cite in Indonesian's rule of the law (Undang-Undang) No. 14 in 2008 is about the transparency of public system as the guidelines for other public organizations to create a good system of government.

The background of this research is based on some achievements that have been accomplished by Desa Dermaji in achieving the transparency of public information and good governance. From that phenomenon, the government of Desa Dermaji does many innovations, one of them utilizes technology development as a communication tool to develop public information services through society. The purpose of this research is to know the function of communication in the organization within to build and increase the transparency of Public Information in Desa Permaji. The researcher uses theory of Sendjaja (Bungin, 2006:278-280) regarding the function of communication in the organization. This research also uses descriptive qualitative by using main subjects such as the leader of Desa Dermaji, interview method, observations, and documentations.

The result of this research indicates that the way function of communication in the organization which applied by village government has done well. It can develop the transparency of Public Information towards all of people in Desa Dermaji. Thus, based on communication theory by Sendjaja, government of Desa Dermaji has carried out an informative function, regulative function, persuasive function, and integrative function so they successfully create and develop the transparency of public in this environment.

Keywords: the function of communication in an organization, the transparency of Public Information

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sejak era reformasi, keterbukaan informasi mulai didiskusikan dan direncanakan oleh beberapa pihak yang ingin mewujudkan keterbukaan terhadap sistem pemerintahan. Keseriusan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik mulai terlihat sejak tahun 2011, ketika Indonesia terlibat langsung dalam *Open Government Partnership*, yaitu sebuah forum inisiatif multilateral dari beberapa negara yang bersepakat menyebarkan virus-virus keterbukaan informasi publik, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru. Hal ini tentunya sejalan sebagai konsekuensi dari sistem pemerintah negara demokrasi, yang sudah sejak lama dirumuskan dengan harapan mampu membawa perubahan menuju tata kelola sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai negara yang bersepakat terwujudnya sistem pemerintahan terbuka (*open government*), Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aturan ini digunakan sebagai landasan dari setiap badan publik di Indonesia untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Hadirnya undang-undang ini, tentunya dapat merebut panggung yang semakin hari dikuasai oleh

informasi yang tidak terverifikasi, serta mewujudkan keterbukaan informasi bagi setiap badan publik, sebagai prasyarat sistem demokrasi yang berkualitas. Ditetapkannya suatu undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi publik, merupakan hasil dari kesepakatan banyak pihak. Salah satu pihak sebagai aktor utama dalam keterbukaan informasi publik adalah badan publik.

Berdasarkan tingkatnya, badan publik di Indonesia dibagi menjadi badan publik pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Setiap badan publik mempunyai peranan penting dalam membuka akses atas informasi publik untuk kepentingan masyarakat luas. Keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa (Undang-Undang Desa) menegaskan bahwa Desa merupakan badan publik yang berada di tingkatan paling bawah. Penegasan posisi desa sebagai badan publik, salah satunya karena desa mendapat anggaran langsung dari APBN. Sejak diterapkannya Undang-Undang Desa, pemerintah semakin serius dalam memperhatikan lembaga publik tingkat terbawah ini, keseriusan ini dibuktikan dengan dibentuknya kementerian khusus yang menangani desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) pada tahun 2014.

Desa sebagai badan publik dan juga sebagai suatu bentuk organisasi pemerintahan, mempunyai perangkat desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam mengelola dan mengembangkan desa menuju sistem pemerintahan yang terbuka, Arni Muhammad berpendapat,

sifat keterbukaan suatu organisasi tidaklah baik terlalu terbuka atau terlalu tertutup dalam memberikan dan menerima informasi, tetapi perlu menyesuaikannya dengan tingkat keterbukaan sistem terhadap lingkungan dalam merespons suatu situasi Muhammad (2009:52). Hal ini tentu mendorong pemerintah desa beserta jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas, dalam memahami tugas dan fungsi kerja organisasi.

Perangkat desa sebagai bagian yang menjalankan organisasi pemerintahan desa, hendaknya harus memiliki integritas dalam menjalankan kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik kepada masyarakat secara profesional. Namun dalam praktiknya, perangkat desa di Indonesia masih jauh dari integritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang menerapkan kaidah-kaidah keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak praktik korupsi dana desa yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), sejak tahun 2015 hingga 2018 kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp. 40,6 miliar (<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all> diakses pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 23:43).

Kasus di atas menunjukkan masih lemahnya integritas perangkat desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta

lemahnya sinergitas lembaga pemerintah tingkat desa dalam menerapkan fungsi komunikasi organisasi, menjadi salah satu faktor penghambat terwujudnya asas-asas keterbukaan informasi, Sehingga masih terjadinya penyelewengan, dan tidak menutup kemungkinan berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap badan publik.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa adanya perhatian lebih pada desa sebagai badan publik, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa dan dibentuknya kementerian khusus yang menangani desa, belum bisa menjamin secara penuh dalam menciptakan lembaga pemerintahan tingkat desa yang berintegritas dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hal ini menuntut pemerintah desa agar memperkuat fungsi komunikasi dalam organisasi, sebagai upaya memperbaiki sinergitas dan integritas perangkat desa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Persoalan lemahnya komunikasi organisasi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh pada terwujudnya sistem pemerintahan desa yang terbuka terhadap informasi publik, juga dibuktikan dengan masih minimnya pemahaman dan kesadaran perangkat desa dalam mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, serta memberikan layanan informasi yang masih dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permohonan penyelesaian sengketa informasi, khususnya pada badan publik tingkat desa di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data statistik permohonan

penyelesaian sengketa informasi dari Komisi Informasi Jawa Tengah memaparkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Data statistik permohonan penyelesaian sengketa informasi



(Sumber: <https://kipjateng.jatengprov.go.id/statistik-permohonan-psi/>)

Tercatat badan publik pemerintah desa yang disengketakan dari tahun 2014 sampai 2018 terdapat 8 kasus.

(<https://kipjateng.jatengprov.go.id/statistik-permohonan-psi/> - diakses pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 01:53). Terdapat peningkatan terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2018, menjadi bukti bahwa masih lemahnya pemerintah desa dalam menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik.

Berdasarkan pemaparan di atas Desa Dermaji merupakan salah satu desa di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Lumbir, yang mempunyai komitmen dalam mengembangkan keterbukaan

informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang pernah diraih desa dermaji dalam KIP Awards 2018 oleh Komisi Informasi Jawa Tengah (KIP) Jateng, Sebagai desa yang berprestasi dalam keterbukaan informasi publik. (<https://jatengprov.go.id/publik/di-jateng-virus-transparansi-tersebar-hingga-pedesaan/> - diakses hari Rabu, 10 April 2019 pukul 10.28). Dengan diberikannya penghargaan ini, Desa Dermaji menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Banyumas, yang mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Tengah, sebagai desa yang menerapkan keterbukaan informasi publik terbaik. Penghargaan tersebut menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pemerintah desa dan elemen masyarakat lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala Desa Dermaji menjelaskan bahwa keberhasilan desa dalam mewujudkan keterbukaan informasi, salah satunya dengan memanfaatkan website desa sebagai media yang digunakan dalam penyampaian informasi seputar desa. Pengelolaan *website* desa dermaji tidak terlepas dari peran komunikasi organisasi, seperti komunikasi yang dilakukan kepala desa dermaji kepada desa lain guna menunjang keberhasilan terwujudnya pengelola *website* yang baik, dan juga komunikasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat dalam hal sosialisasi dan edukasi.

Sebagai sebuah badan publik yang mempunyai kaidah-kaidah yang termaktub di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah desa mempunyai kewajiban mengembangkan sistem informasi

dan dokumentasi serta memberikan layanan informasi publik secara terbuka. Telah dijelaskan pula perintah Allah SWT dalam Al-Quran agar kita mempunyai sikap terbuka, terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi:

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

Artinya : “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.” (QS. Al-Hijr : 94).

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan, bahwa kita sebagai umat manusia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka atau terang-terangan. karena dengan menyampaikan suatu informasi secara terbuka akan banyak manfaat yang diperoleh, salah satunya dapat menumbuhkan sifat kejujuran, yang dapat memupuk rasa kepercayaan orang lain pada diri kita. Kaitannya dengan penelitian ini, sebagai badan publik yang memegang kepentingan atas informasi yang dibutuhkan masyarakat, untuk selalu mengedepankan dan mengupayakan aspek-aspek keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi dapat terwujud salah satunya dengan berjalannya fungsi komunikasi dalam organisasi.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui kinerja pemerintahan desa untuk mengupayakan dan menerapkan fungsi komunikasi organisasi dalam mengembangkan keterbukaan informasi publik. Maka dari itu peneliti mengambil judul

“Fungsi Komunikasi Organisasi dalam Mengembangkan Keterbukaan Informasi (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Desa Dermaji Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi komunikasi organisasi dalam mengembangkan keterbukaan informasi di Desa Dermaji Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi komunikasi organisasi di Desa Dermaji dalam mengembangkan keterbukaan informasi publik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan keilmuan komunikasi pada umumnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan komunikasi organisasi khususnya. selain itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pembaca maupun Badan Publik terkait, untuk memaksimalkan fungsi komunikasi organisasi sebagai upaya mewujudkan dan mengembangkan keterbukaan informasi publik, menuju sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperkuat dan mendukung penelitian ini, maka sebelumnya peneliti melakukan studi literatur terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dan pembahasan. Dengan melakukan studi literatur dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengembangkan penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa penelitian yang telah disusun oleh peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan pustaka adalah sebagai berikut :

Tinjauan pustaka pertama yang digunakan peneliti adalah Jurnal Development VOL. 6 NO. 1 Juni 2018 STIE Muhammadiyah Jambi. Penelitian ini dilakukan oleh Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, Dosen STIE Muhammadiyah Jambi. dengan judul “Peranan Media Komunikasi Dan Keterbukaan Informasi Dalam Mengembangkan Organisasi Muhammadiyah di Jambi”, yang dilakukan pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk melihat kondisi media komunikasi yang digunakan oleh organisasi Muhammadiyah serta sulitnya akses informasi tentang organisasi Muhammadiyah yang dirasakan oleh masyarakat Jambi.

Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, dan pembahasan penelitian sama-sama seputar keterbukaan informasi dalam suatu organisasi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yang diteliti, penelitian milik Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, Dosen STIE Muhammadiyah Jambi, pada pengembangan organisasi Muhammadiyah di Jambi. Sedangkan objek penelitian peneliti pada pengembangan keterbukaan informasi publik di Desa Dermaji Kabupaten Banyumas.

Kemudian telaah pustaka kedua yang digunakan adalah E-Jurnal “Acta Diurna” Volume V. No. 5. Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan oleh Oktaviani Margareta Katuuk, Nourma Mewengkang, Edmon R. Kalesaran, dengan judul “Peran Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Eksistensi Sanggar Seni Vox Angelica”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan beberapa masukan kepada Sanggar Seni Vox Angelica untuk melakukan perubahan agar Sanggar Seni Vox Angelica dapat meningkatkan eksistensi mereka di tengah sengitnya persaingan sanggar seni suara yang ada di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado.

Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, kemudian metode pengumpulan data sama-sama menggunakan tahapan wawancara, dokumentasi, dan observasi, dan fokus penelitian pada fungsi komunikasi organisasi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian

yang diteliti, penelitian milik Oktaviani Margareta Katuuk Dkk, memfokuskan objek penelitian pada peningkatan eksistensi sanggar seni Vox Angelica di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado. Sedangkan objek penelitian peneliti pada pengembangan keterbukaan informasi desa dermaji di kabupaten Banyumas.

Telaah pustaka ketiga adalah Jurnal JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016. Penelitian ini dilakukan oleh Herda Astuti Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesits Riau, dengan judul “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dan fokus objek penelitian sama-sama membahas keterbukaan informasi publik. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian yang diteleti. Penelitian yang dilakukan oleh Herda Astuti memfokuskan subjek penelitian pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi lainnya yang berkenaan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan subjek penelitian peneliti, adalah Kepala Desa dan pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas.

Tabel 1.1

Matrik Tinjauan Pustaka

NO	Judul dan Penulis	Nama/Asal	Persamaan	Perbedaan
1.	Peranan Media Komunikasi Dan Keterbukaan Informasi Dalam Mengembangkan Organisasi Muhammadiyah di Jambi, ditulis oleh Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, Dosen STIE Muhammadiyah Jambi	Jurnal Development VOL. 6 NO. 1 Juni 2018 STIE Muhammadiyah Jambi	Pembahasan penelitian sama-sama seputar keterbukaan informasi dalam suatu organisasi	Objek penelitian yang diteliti, pada Jurnal ini yaitu pengembangan organisasi Muhammadiyah di Jambi. Sedangkan objek penelitian peneliti pada pengembangan keterbukaan informasi publik di Desa Dermaji Kabupaten Banyumas
2.	Peran Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Eksistensi Sanggar Seni Vox Angelica, ditulis oleh Oktaviani Margareta Katuuk, Nourma Mewengkang, Edmon R. Kalesaran	E-Jurnal "Acta Diurna" Volume V. No. 5. Tahun 2016	Sama-sama fokus penelitian pada peran atau fungsi komunikasi organisasi	Objek penelitian yang diteliti dalam jurnal ini mengenai peningkatan eksistensi sanggar seni Vox Angelica sedangkan peneliti pada pengembangan keterbukaan informasi publik
3.	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015 Ditulis oleh, Herda Astuti Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesits Riau	Jurnal JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016	fokus objek penelitian sama-sama membahas keterbukaan informasi publik	Subjek yang diteliti dalam jurnal ini adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Sumber: Olahan Peneliti

F. Landasan Teori

1. Komunikasi Organisasi

a. Pengertian Komunikasi Organisasi

Redding dan Sanborn mengatakan komunikasi organisasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan informasi dalam suatu organisasi yang kompleks (Masmuh 2010:5). Dalam ruang lingkup pengertian diatas yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi dari atasan kepada bawahan komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal, keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis, dan komunikasi evaluasi program.

Sedangkan menurut Goldhaber mengatakan, komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungan baik internal maupun eksternal (Ruliana 2014:20) Melalui sistem inilah menurut Goldhaber, akan terjadi proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Dari definisi tersebut maka melahirkan tujuh konsep khusus yang terkandung pada suatu organisasi meliputi:

1) Proses

Sebagai sebuah sistem terbuka yang dinamis, anggota organisasi akan menciptakan dan saling menukarkan pesan.

Pesan atau informasi yang diciptakan inilah dikatakan sebagai suatu proses karena gejala menciptakan dan menukar informasi dalam sebuah organisasi akan berjalan terus menerus, mengikuti perkembangan dan dinamika organisasi.

2) Pesan

Pesan diartikan sebagai susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, dan kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang lain. Komunikasi akan berjalan dengan efektif, apabila pesan yang dikirimkan akan diartikan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pengirim

3) Jaringan

Dalam suatu organisasi, terdapat orang-orang yang mempunyai posisi dan peranan yang berbeda-beda. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang di dalam suatu organisasi ini terjadi melalui suatu set jalan kecil yang dinamakan jaringan

komunikasi. Hakikat dan luas dari jaringan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: Hubungan peranan, arah dan arus pesan, hakikat seri dari arus pesan, dan isi pesan.

4) Keadaan saling tergantung

Sebagai sebuah sistem yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri, organisasi memiliki sifat saling tergantung antara bagian satu dengan bagian lainnya. Bila suatu bagian dari organisasi mengalami gangguan maka akan berpengaruh

kepada bagian lainnya dan mungkin juga seluruh sistem organisasi.

5) Hubungan

Organisasi merupakan sebuah sistem terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsinya bagian-bagian dalam organisasi terletak pada tangan manusia. Pesan dalam suatu organisasi akan dihubungkan oleh manusia, oleh karena itu hubungan manusia dalam organisasi menjadi penting. Hubungan ini dapat diwujudkan mulai dari yang sederhana yaitu hubungan diantara dua orang sampai kepada hubungan yang kompleks.

6) Lingkungan

Dalam suatu organisasi, lingkungan dapat dibedakan atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang termasuk lingkungan internal adalah personalia (karyawan), golongan fungsional dari organisasi, dan komponen organisasi lainnya seperti tujuan, produk, jasa. Sedangkan lingkungan eksternal adalah para pelanggan, konsumen, pesaing, dan teknologi.

7) Ketidakpastian

Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Misalnya, suatu organisasi memerlukan informasi perihal aturan pemerintah yang berpengaruh terhadap produksi barang-barangnya.

Berdasarkan pemaparan pengertian komunikasi organisasi oleh beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan yang dilakukan dalam ruang lingkup organisasi yang setiap anggotanya memiliki ketergantungan dan tujuan yang sama.

b. Dimensi-dimensi Komunikasi Organisasi

1) Komunikasi Internal

Menurut Lawrence D. Brennan berpendapat, komunikasi internal adalah :

pertukaran gagasan yang dilakukan administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau jawatan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan atau jawatan tersebut lengkap dengan strukturnya yang khas (organisasi) dan pertukaran gagasan secara horisontal maupun vertikal di dalam perusahaan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. (Efendy, 1985:155)

Dalam hal ini komunikasi internal dibagi menjadi tiga jenis:

a) Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal yaitu komunikasi yang dilakukan dari atas kebawah atau sebaliknya dari bawah keatas, atau komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik. Komunikasi timbal balik dalam organisasi sangat penting karena jika hanya satu arah maka roda organisasi tidak akan berjalan dengan baik.

Proses komunikasi ini memiliki tujuan untuk menjalin kerjasama dengan menciptakan hubungan-

hubungan manusia dengan manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

b) Komunikasi Horizontal

Komunikasi horisontal merupakan komunikasi secara mendatar, antar anggota atau karyawan dalam ruang lingkup organisasi. Komunikasi ini lebih bersifat nonformal yang dilakukan sesama karyawan diluar jam kerja, misalnya ketika istirahat, sedang rekreasi, atau pada waktu pulang kerja.

c) Komunikasi Diagonal

Komunikasi diagonal lintas saluran merupakan komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain, atau dalam pengertian lain, komunikasi ini memutuskan alur komunikasi yang ditentukan oleh organisasi, yang biasanya melewati tahapan dan prosedur tertentu.

2) Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. komunikasi ini dilakukan pada instansi-instansi pemerintah seperti departemen, direktorat, dan sebagainya. Komunikasi eksternal dibagi menjadi dua yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak, dan dari khalayak kepada organisasi.

a) Komunikasi dari organisasi kepada khalayak

Komunikasi ini pada umumnya lebih bersifat informatif, dengan melibatkan khalayak sebagai target atau sasaran tujuan dalam penyampaian suatu informasi.

Komunikasi dari organisasi kepada khalayak dapat melalui berbagai bentuk seperti : Majalah organisasi, press release, artikel surat kabar atau majalah, film dokumenter , brosur, leaflet, poster dan sebagainya. dalam prosesnya, komunikasi eksternal memanfaatkan media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak secara masif.

b) Komunikasi dari khalayak kepada organisasi

Komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan feedback atau umpan balik untuk menanggapi kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi.

feedback atau umpan balik ini bersifat tidak langsung bisa berupa saran, kritikan, maupun tindakan.

c. Bentuk-bentuk Komunikasi Organisasi

Komunikasi sebagai elemen yang cukup penting dalam penyampaian pesan dalam sebuah organisasi mempunyai bentuk-bentuk komunikasi organisasi, menurut Bangun (2012:364) bentuk komunikasi organisasi terdiri dari:

1) Komunikasi Tertulis

Komunikasi tertulis merupakan bentuk penyampaian pesan yang dilakukan secara tertulis, dapat berbentuk surat, memo, laporan berkala organisasi, pengumuman di bulletin dan alat lain yang berupa kata-kata atau symbol tertulis.

2) Komunikasi Lisan

Komunikasi lisan merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan. Komunikasi ini sering digunakan pada pertemuan yang bersifat langsung secara tatap muka antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi pada acara formal maupun nonformal,

3) Komunikasi Non-verbal

Komunikasi non verbal dapat diartikan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh, atau isyarat-isyarat tertentu yang dapat dipahami oleh penerima pesan.

Komunikasi ini dilakukan tidak secara tertulis yang meliputi gerakan tubuh, kontak mata, ekspresi wajah dan lain sebagainya.

d. Fungsi Komunikasi Organisasi

Suatu organisasi baik yang berorientasi untuk mencari keuntungan (profit) maupun nirlaba (non-profit) menurut Sendjaja (dalam Bungin 2011: 278) mempunyai empat fungsi antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi Informatif

Fungsi ini memandang organisasi sebagai suatu sistem proses informasi (*information-processing system*). Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam organisasi. orang-orang dalam tatanan manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi maupun untuk menyelesaikan konflik internal organisasi. sedangkan karyawan atau anggota dalam organisasi membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan, informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, dan sebagainya.

2) Fungsi Regulatif

Fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi. pada semua lembaga atau organisasi ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif. Pertama, berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan informasi dalam organisasi. selain itu juga mereka mempunyai kewenangan untuk memberikan intruksi atau perintah. Kedua, berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada

kerja, artinya anggota dalam organisasi membutuhkan kepastian peraturan tentang suatu pekerjaan yang boleh untuk dilaksanakan.

3) Fungsi Persuasif

Dalam mengatur suatu sistem organisasi, tidaklah mudah hanya dengan mengandalkan kekuasaan ataupun kewenangan. Kekuasaan dan kewenangan tidak selamanya membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, banyak pimpinan yang lebih suka mempersuasif bawahannya daripada memberi perintah. Suatu pekerjaan yang sukarela dikerjakan karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar, dibandingkan dengan perintah pimpinan yang menampakkan kekuasaan atau kesewenangannya.

4) Fungsi Integratif

Suatu organisasi berusaha menyediakan saluran yang dapat digunakan karyawan ataupun anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan agar berjalan dengan baik.

Ada dua saluran yang digunakan yaitu, saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dari organisasi tersebut.

Berdasarkan keempat fungsi yang telah dikemukakan oleh ahli di atas, suatu organisasi tidak dapat terlepas dari fungsi komunikasi organisasi dalam membangun organisasinya. Oleh karena itu, keempat fungsi komunikasi organisasi diatas memiliki

peranan penting dalam mengelola tata kelola pemerintah yang baik salah satunya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

2. Keterbukaan Informasi Publik

a. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keterbukaan diartikan sebagai hal terbuka, yang merupakan landasan utama dalam berkomunikasi. Sedangkan informasi, menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah :

Suatu keterangan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik itu data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara elektronik maupun non-elektronik (Dipopramono, 2017 : 24).

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Saat ini keterbukaan informasi publik merupakan hal mutlak bagi negara demokrasi, namun hal ini terkadang dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami. Padahal keterbukaan informasi publik menjadi hal mendasar bagi kesejahteraan rakyat dan pencapaian cita-cita suatu bangsa.

Dengan adanya sistem keterbukaan terhadap akses informasi, setiap warga negara akan dengan mudah mengetahui tata kelola sistem pemerintahan, sehingga akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

b. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan keterbukaan terhadap informasi publik, merupakan hal penting dan mendasar untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) di Indonesia terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku, badan publik yang bersifat tertutup dalam membuka akses informasi terhadap masyarakat, maka dapat digugat dan disengketakan. Dalam hal ini Komisi Informasi sebagai lembaga independen akan menjalankan alur penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mempunyai tujuan yang mulia sebagai pedoman bagi terwujudnya sistem pemerintah yang baik, yaitu mengedepankan

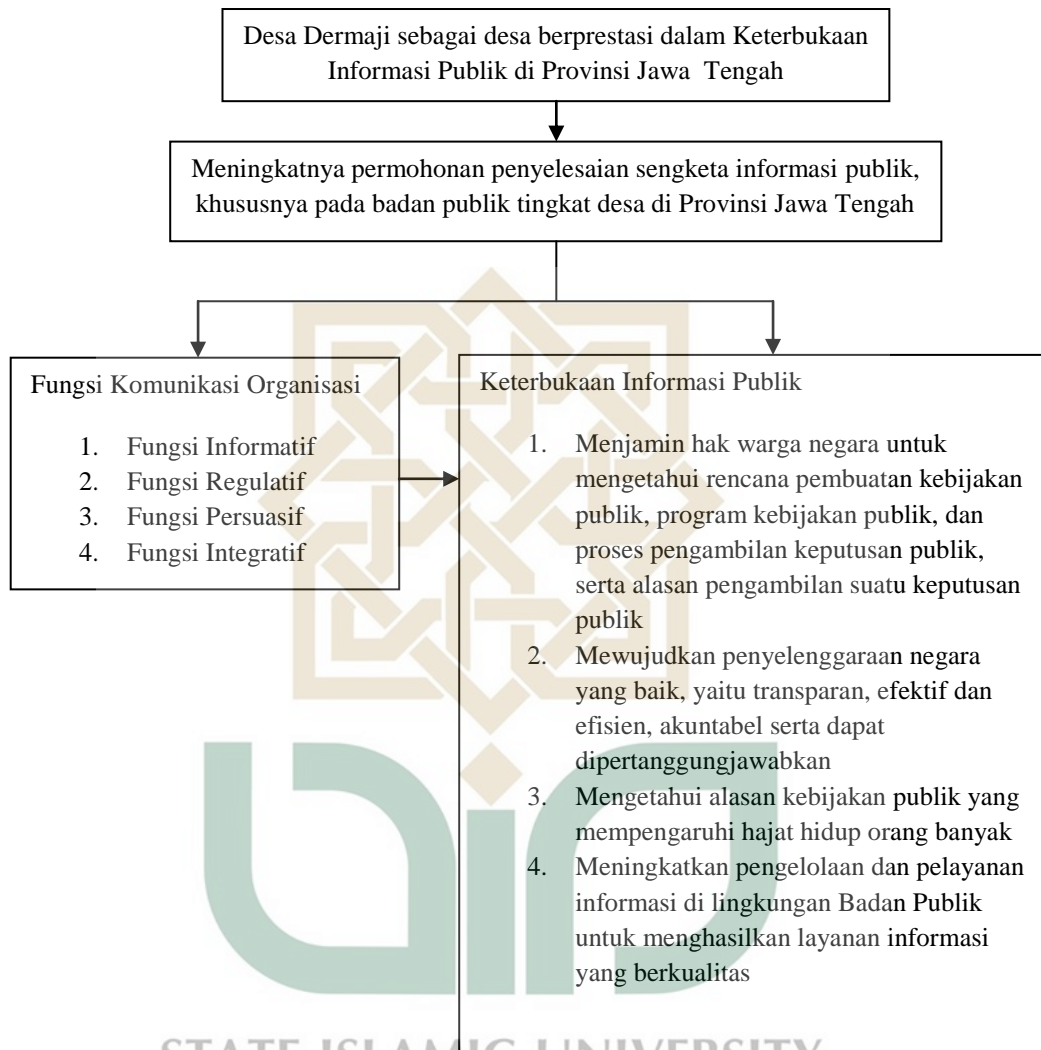
asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun tujuan dari keterbukaan informasi publik termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu :

- 1) Butir a. Menjamin warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
- 2) Butir b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- 3) Butir c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
- 4) Butir d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Butir e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
- 6) Butir f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa

- 7) Butir g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemaparan di atas merupakan tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan otomatis juga merupakan tujuan keterbukaan informasi publik yang terdiri dari tujuh butir. Berdasarkan nilai asasi atau prinsipnya, maka dari tujuh butir tujuan keterbukaan informasi publik tersebut dikelompokkan menjadi tiga asas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu asas transparansi, asas partisipasi dan asas akuntabilitas (Dipopramono, 2017 : 13). Dalam penelitian ini penulis hanya fokus membahas asas transparansi dengan menggunakan empat tujuan keterbukaan informasi sebagai unit analisis. Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka diharapkan akan memudahkan setiap Badan Publik untuk bersikap terbuka, sehingga hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik lebih terjamin, pengambilan kebijakan publik akan tersampaikan dengan baik, serta layanan publik akan bekerja secara profesional.

G. Kerangka Berfikir



Sumber: Olahan Peneliti

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan proses atau cara, yang akan dilakukan peneliti dalam menyusun dan menggali informasi atau data terkait penelitian. Adanya penggunaan dan pemilihan metode penelitian yang tepat diharapkan dapat membantu peneliti dalam menyusun penelitian secara rasional dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang bersifat alamiah. Bodyan dan Taylor (1986: 5) dalam (Basrowi 2008: 21) mengatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang yang akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian. Subjek penelitian harus memahami informasi objek penelitian Bungin (2007 : 76). Adapun teknik memperoleh informan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *snowballing sampling* dan *key person*. *Snowballing sampling* digunakan apabila peneliti tidak mengetahui siapa yang memahami informasi objek penelitian, sedangkan *key person* merupakan teknik yang digunakan apabila peneliti sudah memahami

informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian (Bungin, 2007 : 77). *Key person* merupakan tokoh formal atau tokoh informal disuatu perusahaan atau lokasi penelitian. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik *key person*, karena telah mengetahui dan menentukan informan penelitian berdasarkan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bapak Bayu Setyo Nugroho, selaku Kepala Desa Dermaji.
- b. Bapak Harry Haryono Caryono selaku Sekretaris Desa Dermaji sekaligus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- c. Bapak Andi Dwi Atmoko selaku Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Desa Dermaji
- d. Bapak Naris selaku tokoh masyarakat di Desa Dermaji

Setelah menentukan subjek penelitian, maka peneliti akan dimudahkan dalam proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan objek penelitian merupakan sasaran penelitian yang tidak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian (Bungin, 2007 : 77). Dengan kata lain subjek penelitian merupakan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah memahami fungsi komunikasi organisasi yang dilakukan pemerintah Desa Dermaji dalam mengembangkan keterbukaan informasi publik.

3. Sumber Data

Menurut Arikunto (1992 : 102) Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan berupa dokumen terkait. Lofland dan lofland (dalam Moleong 2006 : 157) Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, dari pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan dalam penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah transkrip hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kepala Desa Dermaji, sekretaris desa, ketua kelompok informasi masyarakat, dan salah satu tokoh masyarakat desa yang tentunya mengetahui terhadap kondisi pemerintah desa dalam mengembangkan keterbukaan informasi desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sebelumnya sudah ada. Data sekunder berupa dokumen-dokumen, literatur, buku, majalah, internet dan data dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Adapun data sekunder yang digunakan penulis yaitu website dermaji.desa.id dan dokumen lain yang ada di kantor Desa Dermaji.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari suatu penelitian. Menurut Deddy Mulyana, wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya, dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2018 : 180). Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan dan menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada narasumber dalam proses wawancara. Hal ini bertujuan supaya penelitian lebih terarah, dan hasil dari wawancara bersifat sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam proses penyusunan penelitian. Adapun daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dapat dikembangkan saat wawancara, dengan menemukan jawaban permasalahan secara lebih jelas dan mendorong subjek penelitian agar menyampaikan secara terbuka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan dokumen-dokumen yang dilakukan penulis untuk memperkuat hasil

penelitian. Menurut Arikunto (2006 : 231) metode dokumentasi merupakan proses mencari data suatu variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengetahui sejarah maupun profil yang berkaitan dengan Desa Dermaji, dengan tetap memperhatikan kredibilitas suatu dokumen.

c. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan langsung yang dilakukan peneliti di lapangan. Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam (suwandi 2008 : 94) mengatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologi. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. metode ini dimanfaatkan untuk mengetahui situasi dan kondisi serta mengenali secara langsung terhadap suatu obyek penelitian. Proses observasi digunakan peneliti untuk memperkuat data hasil penelitian dan mengenali secara langsung baik subyek maupun obyek penelitian.

Metode observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode non partisipan. Metode non partisipan merupakan metode pengamatan dimana peneliti memposisikan diri sebagai orang luar dari kelompok yang ditelitinya. Peneliti akan mengamati

secara langsung komunikasi organisasi yang dilakukan perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan, selama di lapangan, dan setelah peneliti selesai di lapangan. Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2009) analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus menerus selama proses pengumpulan data dalam penelitian.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2009 : 92-99) dalam penelitian kualitatif teknik analisis data dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif reduksi data merupakan cara untuk merangkum, atau memilih hal-hal yang menjadi pokok dari penelitian. Proses reduksi data akan lebih mudah jika dipandu dengan tujuan utama penelitian yang hendak dicapai.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, proses penyajian data dilakukan dengan memberikan uraian singkat terhadap hasil penelitian berupa narasi singkat, grafik, matrik, jaringan dan bagan. Selain itu penyajian data dilakukan agar memudahkan kita dalam memahami

apa yang terjadi, yang akan memudahkan dalam proses kerja selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses penyajian dan analisis data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasi untuk menetapkan sebuah keputusan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti akan memperhatikan langkah-langkah sebelumnya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi dalam suatu penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan agar hasil kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan.

6. Metode Keabsahan Data

Dalam proses penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data penelitian dari berbagai sumber dan metode yang ada. Untuk mencocokkan sebuah data dari hasil penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, hal ini dilakukan untuk memperkuat serta menguji validitas data. Menurut Norman K. Denzin dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Qualitative Research* terdapat empat tipe dasar dalam triangulasi yaitu :

- Triangulasi data, merupakan triangulasi dengan menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian

- Triangulasi peneliti, merupakan triangulasi dengan menggunakan sejumlah peneliti atau *evaluator*
- Triangulasi teori, merupakan triangulasi dengan menggunakan beragam perspektif untuk menginterpretasikan sekelompok data tunggal
- Triangulasi metodologis, yaitu menggunakan berbagai metode untuk mengkaji problem tunggal (Denzin, K. Norman, 2009 : 271)

Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi data atau triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan terhadap sumber lain yang berbeda. Informasi dari sumber lain akan dijadikan sebagai alat ukur dan pertimbangan untuk menguji hasil kesimpulan peneliti, sehingga peneliti dapat mengetahui valid dan tidaknya kesimpulan hasil penelitian. Adapun narasumber atau informan yang menjadi tolak ukur untuk mengecek keabsahan data penelitian yaitu tokoh masyarakat Desa Dermaji, sebagai seseorang yang tinggal dan menetap di Desa Dermaji serta merasakan langsung terhadap setiap kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah dijalankan pemerintah desa. selain itu, triangulasi sumber juga telah penulis lakukan dengan seorang praktisi penggiat desa, dari *Institute For Education Development, Social, Religious, and cultural studies* (Infest Yogyakarta) Dalam hal ini tokoh masyarakat Desa Dermaji dan seorang praktisi penggiat desa akan dijadikan sebagai informan untuk

mengetahui atau mengecek kebenaran data informasi mengenai berjalannya fungsi komunikasi organisasi perangkat desa, dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan setelah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan terkait berjalannya fungsi komunikasi organisasi dalam mengembangkan keterbukaan informasi publik. Pemerintah Desa Dermaji menjalankan empat fungsi penting komunikasi organisasi dalam melaksanakan pemerintahannya. Keempat fungsi ini adalah fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif dan fungsi integratif.

Hasil analisis berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dikemukakan bahwa pemerintah Desa Dermaji dalam menjalankan pemerintahannya telah melaksanakan fungsi komunikasi organisasi dengan baik, terbukti dengan hasil data temuan-temuan pada saat melaksanakan penelitian. Pemerintah Desa Dermaji mengembangkan keempat fungsi komunikasi sebagai alat untuk menciptakan ataupun mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian implikasinya adalah dengan terwujudnya pelayanan informasi publik yang diterima oleh seluruh elemen masyarakat secara lebih transparan.

Berdasarkan keempat fungsi komunikasi organisasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dermaji terdapat salah satu fungsi yang dijalankan dengan sangat baik dalam mengembangkan keterbukaan

informasi publik, salah satunya adalah fungsi integratif. Fungsi integratif ini erat kaitannya ataupun sangat berperan penting membantu dalam proses penyampaian informasi, alasannya adalah fungsi ini merupakan sebuah saluran komunikasi, tanpa adanya pemilihan saluran komunikasi yang tepat sebuah informasi tidak dapat tersampaikan dengan baik. Praktiknya, pemerintah Desa Dermaji dalam menjalankan fungsi integratif telah mengembangkan saluran komunikasi berupa website desa yang digunakan pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai informasi-informasi penting kepada masyarakat sehingga terciptanya pengelolaan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

Sementara itu, fungsi komunikasi organisasi yang masih lemah dalam hal pelaksanaannya adalah fungsi regulatif. Pemerintah Desa Dermaji dalam menjalankan fungsi regulatif, terkadang masih kurang memahami akan adanya sebuah aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih kurang maksimal dalam proses pelaksanaannya. Minimnya pemahaman serta kurangnya arahan terkait tugas pokok PPID menjadi kendala yang saat ini masih dialami oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dalam hal ini merupakan wewenang dari Sekretaris Desa Dermaji.

Pemaparan di atas, terlepas dari bagus dan kurangnya pelaksanaan keempat fungsi komunikasi organisasi, pemerintah Desa Dermaji telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan fungsi

komunikasi organisasi. Pemerintah Desa Dermaji sadar betul pentingnya fungsi komunikasi organisasi dalam mengembangkan dan mewujudkan keterbukaan informasi publik, sehingga informasi dan kebijakan-kebijakan yang transparan dapat dimengerti oleh seluruh elemen masyarakat Desa Dermaji.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Sebagai badan publik tingkat desa yang telah mendapatkan prestasi dalam hal keterbukaan informasi publik, pemerintah Desa Dermaji diupayakan untuk bisa mempertahankan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara terus meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis. Termasuk kegiatan pembinaan yang selama ini telah dilaksanakan, seperti pembinaan ketua RT dan RW, pembinaan Pemuda dan Karangtaruna, akan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam mengatur atau mengelola organisasinya. Kemudian dalam bidang pelayanan informasi publik, pemerintah desa sebaiknya juga berupaya untuk melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pembinaan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas kerja PPID dan KIM agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya lebih maksimal sehingga akan membantu dalam mempertahankan serta mendorong pemerintah desa dalam

mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik baik, yaitu yang terbuka terhadap informasi publik.

2. Sebagai pihak yang mempunyai hak dalam memperoleh informasi publik, masyarakat Desa Dermaji sebaiknya harus bersikap kritis dan memahami terhadap persoalan-persoalan desa. Sikap kritis serta aktif dalam melakukan pengawasan terhadap setiap informasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa sangat diperlukan, supaya tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan kepentingan umum, dan kesejahteraan bersama, karena pada dasarnya terwujudnya keterbukaan informasi publik tidak bisa dilepaskan dari adanya peran komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan topik fungsi komunikasi organisasi alangkah baiknya mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan penelitian, salah satunya adalah tempat penelitian. Dalam menentukan tempat penelitian harus memperhatikan cakupan wilayahnya, agar dalam mencari dan memperoleh data lebih banyak dan mudah dalam menganalisis, sehingga penelitian selanjutnya lebih konferhensif.

Selain itu, peneliti selanjutnya lebih dalam menjelaskan terkait ketiga asas tujuan keterbukaan informasi publik, tidak hanya menjelaskan asas transparansi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 UU KIP. Sehingga dalam penelitiannya tidak hanya melihat kinerja

pemerintah desa dalam menjalankan fungsi komunikasi organisasinya untuk mengembangkan dan mewujudkan keterbukaan informasi publik dari segi asas transparansi saja, tetapi juga dapat ditambahkan dengan asas partisipasi dan asas akuntabilitas.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran atas penyusunan skripsi yang berjudul “Fungsi Komunikasi Organisasi dalam Mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik”. Serta tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu, menginspirasi dan mengarahkan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berkah terkhusus dalam bidang akademik dan penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan di dalam penyusunan skripsi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2012. Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Suuprise

Buku

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta

Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Bungin, Burhan. 2011. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana

Dipopramono, Abdulhamid. 2017. *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Jakarta : Renebook

Effendy, Onong Uchjana. 1985. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : Remadja Karya CV

Jalil, Arifuddin. 2007. *Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish

Masmuh, Abdullah. 2010. *Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Teori Dan Praktek*. Malang : UMM Press

Muhammad, Arni. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Mulyana, Deddy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nurjaman, Kadar, Khaerul Umam. 2012. *Komunikasi Public Relation*. Bandung: Pustaka Setia

Lexy J. Moeloeng. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Ruliana, Poppy. 2014. *Komunikasi Organisasi Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press

Jurnal

Astuti, Herda. 2016. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015. *Jurnal JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016

Elfie Mingkid, Stefi H. 2018. “Komunikasi Organisasi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Masyarakat di Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Hal. 76

Fatimah, Sitti, Hafied Cangara. “Pemanfaatan Saluran Komunikasi dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Pemerintah Kabupaten Pinrang”. *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 5 No. 1 Hal. 79-91

Margareta Katuuk, Oktaviani. 2016. “Peran Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Eksistensi Sanggar Senin Vox Angelia”. *e-journal “Acta Diurna”* Vol. No. 5. Tahun 2016

Paramita, Nih Luh Mas. 2017. “Komunikasi Persuasif Pemerintah Desa Dinas dalam Mengimplementasikan Ajaran Tri Hita Karana di Desa Ngis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem”. *Jurnal Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar* Vol. 1 No. 2 Oktober 2017. Hal. 581-584

Rahayu, Yunie. 2018. “Peranan Media Komunikasi Dan Keterbukaan Informasi Dalam Mengembangkan Organisasi Muhammadiyah di Jambi”. *Jurnal Development* VOL. 6 NO. 1 Juni 2018 STIE Muhammadiyah Jambi

Internet

Bw 2018. “Di Jateng Virus Transparansi Tersebar Hingga Pedesaan”. <https://jatengprov.go.id/publik/di-jateng-virus-transparansi-tersebar-hingga-pedesaan/> dalam .go.id

Fandi Achmad 2019. “Statistik Permohonan PSI” <https://kipjateng.jatengprov.go.id/statistik-permohonan-psi/> dalam go.id

Ihsanuddin 2018. “ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar”. (<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar> dalam [kompas.com](https://www.kompas.com))

Tim Redaksi 2018. “Desa Dermaji Raih Penghargaan Sebagai Desa dengan Website Informatif dari Komisi Informasi Jateng”. (<https://www.dermaji.desa.id/desa-dermaji-raih-penghargaan-sebagai-desa->

[dengan-website-informatif-dari-komisi-informasi-jateng/](#) dalam website [desa.id](#)

Tim Redaksi 2019. “Inovasi Desa Demit Raih Penghargaan sebagai TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian PANRB” <https://www.dermaji.desa.id/inovasi-desa-demit-raih-penghargaan-sebagai-top-99-inovasi-pelayanan-publik-2019-dari-kementerian-panrb/> dalam [website.desa.id](#)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA